

# Refleksi

**JURNAL KAJIAN AGAMA DAN FILSAFAT**

**“Wajah Islam: Antara Militansi dan Toleransi”**

## **WACANA**

**Chaider S. Bamualim**

**Konsolidasi Militan Islam dan Reproduksi Makna Jihad**

**Mardani**

**Syariat Islam dalam Yuridis Formal: Studi atas Nanggroe Aceh Darussalam**

**Sirojuddin Aly**

**Konstruksi Tatanan Dasar Politik dalam Islam**

**Haniah Hanafie**

**Transformasi Peran Ulama dalam Pergerakan Politik**

**Ahmad Abrori**

**Merayakan Toleransi: Studi atas Masyarakat Muslim Pandeglang**

## **TULISAN LEPAS**

**Rosmaria Syafariyah Widjajanti**

**Kesatuan dan Harmoni dalam Masyarakat Jawa**

# Refleksi

**Jurnal Kajian Agama dan Filsafat**



**Refleksi**  
**Jurnal Kajian Agama dan Filsafat**  
Vol. VIII, No. 1, 2006

**Dewan Redaksi**

M. Quraish Shihab  
Komaruddin Hidayat  
M. Din Syamsuddin  
Amsal Bakhtiar  
Kautsar Azhari Noer  
Hamdani Anwar  
Zainun Kamal F

**Pemimpin Redaksi**

Edwin Syarif

**Anggota Redaksi**

Wiwi Siti Sajaroh  
A. Bakir Ihsan

**Sekretariat**

Suzanti Ikhlas

**Penerbit**

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

**Alamat Redaksi**

Jl. Ir. H. Djuanda No. 95, Ciputat, Jakarta Selatan  
Telp. (021) 749 3677, 749 3579, 740 1925  
Fax. (021) 749 3677  
Email: [jurnalrefleksi@yahoo.com](mailto:jurnalrefleksi@yahoo.com)

**Refleksi** adalah jurnal yang terbit 3 (tiga) kali setahun, telah diakreditasi oleh Departemen Pendidikan Nasional RI melalui SK No. 39/DIKTI/Kep./2004. Refleksi menerima kontribusi tulisan berupa artikel, liputan akademik, laporan penelitian, dan tinjauan buku. Panjang tulisan minimal 10 halaman kuarto spasi ganda. Isi tulisan merupakan tanggung jawab penulis.

---

## TABLE OF CONTENTS

---

### *Editorial*

- ~ Wajah Islam: Antara Militansi dan Toleransi

### *Articles*

- 1-18      **Konsolidasi Militan Islam dan Reproduksi Makna Jihad**  
*Chaider S. Bamualim*
- 19-30     **Syariat Islam dalam Yuridis Formal: Studi atas Nanggroe Aceh Darussalam**  
*Mardani*
- 31-50     **Konstruksi Tatanan Dasar Politik dalam Islam**  
*Sirojuddin Aly*
- 51-64     **Transformasi Peran Ulama dalam Pergerakan Politik**  
*Haniah Hanafie*
- 65-78     **Merayakan Toleransi: Studi atas Masyarakat Muslim Pandeglang**  
*Ahmad Abrori*

### *Document*

- 79-90     **Gerakan Anti Korupsi dan Restrukturisasi Gaji Pegawai Negeri**  
*Achmad Zainuri*
- 91-104    **Kesatuan dan Harmoni dalam Masyarakat Jawa**  
*Rosmaria Syafariyah Widjajanti*
- 105-118   **Sains dan Agama dalam Epistemologi Islam dan Barat**  
*Edwin Syarif*

## WAJAH ISLAM: ANTARA MILITANSI DAN TOLERANSI

ISLAM mengalami evolusi sesuai konteks sosial budaya dan politik yang mengitarinya. Itu pula yang menyebabkan Islam lahir dalam beragam wajah. Militansi dan toleransi adalah di antara wajah Islam. Keduanya bisa hadir secara bersamaan, tapi bisa berhadapan secara frontal. Hal tersebut terlihat dari ragam pemaknaan terhadap realitas sosial yang disajikan oleh para penulis di dalam jurnal **Refleksi** kali ini.

Tulisan pertama disajikan oleh Chaider S. Bamualim yang mengkaji masalah konsolidasi militan dalam Islam melalui reproduksi makna jihad. Menurutnya Islamisasi yang melanda dunia Islam dalam dasawarsa belakangan berhasil mengkonsolidasi gerakan Islam dan mereproduksi makna jihad. Lebih dari itu, hal tersebut telah berhasil mengaktifkan jihad sebagai instrumen ideologis yang kontroversial. Gejala ini secara tak terelakkan sering-kali menimbulkan kesalahpahaman, baik oleh kaum Muslim sendiri maupun kalangan non-Muslim di Barat maupun di Timur. Bagi sebagian sarjana Barat, jihad yang merupakan ajaran Islam adalah perang agama (*holy war*), karenanya, Islam dicap sebagai agama brutal, yang menerapkan pola-pola militerisme serta menyatakan perang bukan saja absah tetapi juga suci.

Proses Islamisasi juga menjelma dalam bentuk formalisasi syariat yang diterapkan dalam sebuah negara bangsa (*nation state*). Hal tersebut sebagaimana dipotret oleh Mardani dalam penerapan syariat di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Penerapan syariat di bumi rencong ini tidak terlepas dari perjuangan panjang rakyat Aceh dalam upaya mendapatkan status otonomi khusus. Setelah melalui perjuangan panjang dan melelahkan akhirnya Rancangan Undang-undang tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam disahkan menjadi Undang-undang yaitu Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Hal mendasar dari Undang-undang ini adalah pemberian kesempatan yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri termasuk menggali dan mengimplementasikan tata

bermasyarakat yang sesuai dengan nilai luhur kehidupan masyarakat Aceh dan mengaplikasikan syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat.

Kehidupan bermasyarakat dan bernegara dari dulu hingga sekarang memerlukan seperangkat tatanan, baik yang bersumber dari ajaran agama secara langsung atau melalui keputusan-keputusan berdasarkan keperluan kontemporer, baik tatanan itu sudah diundangkan secara tertulis atau belum ditulis, baik tatanan itu bersifat asasi (undang-undang dasar) atau pengembangan. Menurut Sirojuddin Aly dengan tatanan yang ada, kehidupan bermasyarakat dan bernegara menjadi teratur dan tertib. Sebaliknya tanpa adanya seperangkat tatanan, dapat dipastikan kehidupan bermasyarakat menjadi semrawut, tidak teratur dan pasti akan terjadi hukum rimba. Sirojuddin Aly mencoba mengemukakan beberapa prinsip dasar dalam mengatur kehidupan masyarakat dan negara dari perspektif pemikiran politik Islam, seperti prinsip musyawarah, persamaan, kemerdekaan, penegakan keadilan dan sebagainya. Prinsip-prinsip ini ternyata merupakan nilai-nilai universal, di mana bangsa-bangsa yang beradab dalam bermasyarakat dan bernegara juga menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Namun dalam rangka kontekstualisasi, penafsiran dan pemaknaan terhadap prinsip-prinsip tersebut sering tak terelakkan.

Hal ini juga terjadi dalam memahami peran dan fungsi ulama. Menurut Haniah Hanafie, ulama atau kiai sering dipahami sebagai sumber panutan keagamaan. Namun dalam perkembangannya, ulama tidak hanya sebagai panutan dalam menjalankan ajaran agama, tetapi seluruh aspek kehidupan, sehingga semua perilaku dan tindakan ulama akan ditiru tanpa reserve. Bahkan masyarakat pengikutnya (jamaahnya) cenderung membenarkan atau melindunginya apabila sang ulama mengalami tantangan dari pihak lain. Dengan kata lain, kepatuhan terhadap ulama sangat diutamakan atau dengan istilah lain *taqlid*. Peran ulama yang dikenal selama ini hanya sebagai pendakwah, penceramah, pengasuh pondok pesantren dan pemuka agama, ternyata tidaklah demikian, karena sejarah membuktikan bahwa ulama juga ikut berperan dalam politik praktis, baik pada masa Kolonial Belanda, Jepang dan Kemerdekaan. Namun pada masa Orde Baru peran Ulama mengalami penyempitan. Ulama dikembalikan kepada peran awalnya sebagai sumber pengetahuan dan keteladanan keagamaan.

Muara dari wacana dan aktualisasi ajaran agama adalah terciptanya tatanan yang harmonis dan penuh kedamaian. Hal tersebut bisa dicapai

apabila di dalam diri masyarakat terserap nilai-nilai yang menjunjung toleransi. Menurut Ahmad Abrori masalah toleransi sesungguhnya terkait dengan artikulasi wacana dan realisasi praktiknya dalam kehidupan nyata. Keduanya saling terkait dan saling mendukung bagi terciptanya hubungan yang baik antar umat beragama. Namun disayangkan, apa yang menjadi kenyataan sehari-hari tidak didukung oleh artikulasi wacana secara baik. Akibatnya, terdapat ketegangan wacana di kalangan masyarakat bila membicarakan toleransi. Hal inilah yang terlihat dalam masyarakat Pandeglang, Banten.

**Refleksi** kali ini juga menurunkan tulisan yang mengulas tentang pemberantasan korupsi. Menurut Achmad Zainuri geliat dan gegap gempita pemberantasan korupsi yang berlangsung saat ini tidak lepas dari lampu hijau dan kemauan politik (*political will*) yang diberikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pada periode sebelumnya, pemberantasan korupsi berjalan setengah hati dan tersendat-sendat karena ada sebagian tersangka korupsi kakap yang mendapat proteksi dari orang kuat, sehingga kasusnya mengendap.

Kajian lain terkait dengan harmoni disajikan oleh Rosmaria. Berdasarkan studi terhadap masyarakat Jawa, hubungan antara manusia dengan Tuhan merupakan suatu kesatuan dan harmoni. Hubungan yang selaras ini sebagai model bagi hubungan antara manusia dengan masyarakat. Usaha untuk mencapai keselarasan dilakukan dengan memelihara ketertiban dalam masyarakat. Dengan demikian kesatuan individu dan masyarakat menyiratkan adanya keteraturan. Ancaman terhadap harmoni ini adalah ambisi dan nafsu pribadi. Seseorang dalam masyarakat yang terlalu ambisi dan mengedepankan kehendak pribadi dianggap sebagai ancaman terhadap ketertiban sosial.

Sebagai penutup, Edwin Syarif memaparkan permasalahan hubungan antara sains dan agama. Perkembangan hubungan antara sains dan agama mengalami pergeseran pada masa modern, yaitu munculnya sains-sains sekuler yang menolak agama. Sains dan agama dalam masa kejayaan Islam tidak pernah berpisah bahkan keduanya saling mendukung. Oleh karena itu di masa sekarang ini, perlu adanya sintesis epistemologi antara Islam dan Barat, yang kelak diharapkan dapat memunculkan sains-sains yang dapat mengatasi permasalahan manusia tanpa dibarengi dengan dampak negatif dari sains itu sendiri.



Rangkaian sajian tulisan dalam **Refleksi** kali ini merupakan ekspresi dari ragam dimensi kemanusiaan yang penuh harmoni dan toleransi di satu sisi, dan militansi di sisi yang lain. Selamat membaca.

Jakarta, Januari 2006

*Redaksi*

## TRANSFORMASI PERAN ULAMA DALAM PERGERAKAN POLITIK

**Haniah Hanafie**

Ilmu Politik Fakultas Ushuluddin & Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta  
*haniah.hanafie@uinjkt.ac.id*

**Abstract:** *Ulama or kiai is often understood as a religious authority. However, in its development, ulama is not only seen as a guide in practicing religious teachings but also in all aspects of life, so that all behaviors and actions of ulama will be imitated without reserve. Even their followers (jamaah) tend to justify or protect them when the ulama face challenges from other parties. The role of ulama known so far only as preachers, lecturers, caretakers of Islamic boarding schools, and religious leaders, turns out to be not like that, because history proves that ulama also play a role in practical politics. This article attempts to revisit the role played by ulama in the political arena, both during the Dutch Colonial, Japanese, and Independence periods, especially during the New Order era, where the role of ulama underwent changes. Ulama were returned to their purely religious role.*

**Keywords:** *Ulama or kiai, religious movement, Islam, political movement.*

**Abstrak:** *Ulama atau kiai sering dipahami sebagai sumber panutan keagamaan. Namun dalam perkembangannya, ulama tidak hanya sebagai panutan dalam menjalankan ajaran agama, tetapi seluruh aspek kehidupan, sehingga semua perilaku dan tindakan ulama akan ditiru tanpa reserve. Bahkan masyarakat pengikutnya (jamaahnya) cenderung membenarkan atau melindunginya apabila sang ulama mengalami tantangan dari pihak lain. Peran ulama yang dikenal selama ini hanya sebagai pendakwah, penceramah, pengasuh pondok pesantren dan pemuka agama, ternyata tidaklah demikian, karena sejarah membuktikan bahwa ulama juga ikut berperan dalam politik praktis. Tulisan ini mencoba melihat kembali peran yang dimainkan oleh para ulama dalam gelanggang politik, baik pada masa Kolonial Belanda, Jepang dan Kemerdekaan, khusus pada masa Orde Baru peran ulama mengalami perubahan. Ulama dikembalikan pada peran keagamaan semata.*

**Kata Kunci:** *Ulama, Kiai, Keagamaan, Pergerakan Politik, Islam.*

## **Pendahuluan**

Bagi masyarakat awam, kata Ulama sangat lekat di telinga, namun belum tentu memahami artinya. Kata Ulama adalah bentuk jamak dari kata *ālim*<sup>1</sup> artinya orang-orang yang berilmu atau berpengetahuan. Pengetahuan yang dimiliki adalah pengetahuan agama Islam.

Pengetahuan ini merupakan sumber *power*. Pengetahuan yang dimiliki tidak diperuntukkan bagi dirinya sendiri, melainkan disebarkan melalui surau-surau (di Sumatera) atau Pondok-pondok Pesantren (di Jawa). Biasanya pengelolaannya secara turun temurun-anak cucu hingga ke murid-muridnya.

Di Jawa sering dijumpai Para Ulama yang juga memiliki sumber *power* seperti kekayaan, tanah dan sawah sehingga mereka dapat mendirikan Pondok-pondok Pesantren bagi para santri dengan memungut bayaran yang murah. Jadi kekayaan yang dimiliki tidak diperuntukkan bagi dirinya sendiri tetapi bagi masyarakat luas. Demikian pula dengan ilmu yang dimilikinya.

Pada masa kini, sumber *power* seperti kekayaan dan tanah untuk membangun Pondok Pesantren biasanya diperoleh melalui hasil pengumpulan dana oleh para jamaahnya. Apalagi Ulama-ulama kondang yang telah memiliki reputasi di masyarakat, akan selalu mendapat panggilan berceramah dengan honor yang cukup tinggi.

Ulama yang memiliki kharisma akan sangat dihargai dan merupakan suri teladan bagi masyarakat dengan memberikan contoh perilaku yang

baik dan benar. Namun ada pula perilakunya yang menyimpang dari ajaran-ajaran agama, sehingga tingkah lakunya tidak patut ditiru, sehingga ditinggal oleh para pengikutnya. Abdul Basit Adnan mengatakan bahwa Ulama yang patut ditiru adalah Ulama yang selain mempunyai kecendekiawanan dan kepandaian yang melebihi orang lain, juga mempunyai laku teladan yang patut ditiru. Mereka tidak hanya sekedar berkata atau berkhotbah, akan tetapi mengamalkan segala anjurannya baik untuk diri sendiri, maupun lingkungan masyarakat pengikutnya yang berada di belakangnya.<sup>2</sup>

Kata Ulama secara umum dikenal di tanah air, tetapi khusus di Jawa, Ulama disebut sebagai Kiai. Ulama atau Kiai di Jawa, tidak hanya sebagai penceramah atau pemimpin Pondok, tetapi sering-kali juga diminta sumbangan pemikirannya di segala bidang. Artinya bahwa Ulama atau Kiai tidak sekedar dimohon nasehatnya tentang hal-hal yang berhubungan dengan agama, tetapi juga hampir di segala bidang kehidupan, seperti : masalah politik, ekonomi, maupun budaya.<sup>3</sup>

Dengan demikian, yang dimaksud Ulama adalah seseorang yang memiliki sumber-sumber *power* seperti ilmu pengetahuan agama Islam, kekayaan, kharisma, massa pengikut (santri/jamaah) dan memiliki Pondok Pesantren atau setidaknya mengabdikan hidupnya bagi pendidikan di dalam Pondok Pesantren dan tingkah-lakunya merupakan suri teladan bagi masyarakat pengikutnya.

### **Peran Ulama dalam Pergerakan Politik di Indonesia**

Pergerakan Ulama dalam politik di Indonesia dapat dilihat baik pada masa Kolonial Belanda, Jepang dan masa Kemerdekaan. Masa Kolonial Belanda ditandai dengan munculnya gerakan sosial politik. Gerakan pendidikan dengan munculnya Gerakan Minangkabau, Muhammadiyah, Persis dan Masyarakat Arab. Sedangkan politik ditandai dengan munculnya SI, Permi dan PII. Pada masa penjajahan Jepang dapat dilihat dengan keterlibatan Ulama dalam kantor-kantor Shumuka dan Shumuba semacam Departemen Agama pada waktu itu. Sedangkan pada masa Kemerdekaan, akan dilihat keterlibatan Ulama dalam Piagam Jakarta sampai Demokrasi Parlementer. Pada masa Demokrasi terpimpin hingga Orde Baru dan kalau boleh dikatakan sampai detik ini, peran Ulama mulai menurun, meskipun dapat dilihat pada Era Reformasi ada peningkatan dalam beberapa kasus disintegrasi bangsa seperti di Ambon.

## **Masa Kolonial Belanda – Gerakan Sosial Politik**

Dalam menghadapi pemerintah Kolonial Belanda, umat Islam mulai menyadari bahwa tidak mungkin berkompetisi dengan kekuatan-kekuatan yang berasal dari pihak Kolonial Belanda, apabila masih menggunakan cara-cara tradisional di dalam menegakkan Islam.<sup>4</sup> Umat Islam menyadari bahwa harus ada perubahan-perubahan yang mampu mengatasi penetrasi pihak Kolonial Belanda, baik melalui sosial (pendidikan), maupun politik atau istilah Deliar Noer dengan “gerakan modern Islam” atau “Revitalisasi” istilah Abdul Azis Thaba.<sup>5</sup>

### **a) Gerakan Pendidikan**

Gerakan sosial (pendidikan) di Indonesia ini ditandai oleh kemunculan gerakan di daerah Minangkabau, Persyarikatan Ulama, Muhammadiyah, Persis dan kalangan Masyarakat Arab.

Gerakan Minangkabau dilakukan baik oleh individu maupun lembaga. Individu diwakili oleh beberapa nama antara lain seperti Sheikh Ahmad Khatib yang berasal dari Bukit Tinggi dan belajar ke Mekkah pada tahun 1876. Sheikh Ahmad Khatib adalah salah seorang pelopor dari golongan pembaruan yang menyebarkan pemikirannya dari kota Mekkah melalui orang-orang yang naik haji dan belajar kepadanya. Selain itu, publikasi dari tulisan-tulisannya. Selain itu, Sheikh Thaher Djalaluddin juga orang yang memberikan pengaruhnya kepada kolega dan murid-muridnya melalui majalah Al Imam dan sebuah sekolah Al-Iqbal Al-Islamiyah di Singapura yang kemudian dipindahkan ke Riau.

Orang ketiga yang terlibat dalam pendidikan adalah Sheikh Muhammad Djamil Djambek yang mendirikan Surau Inyik Djambek sebagai tempat pemberian pelajaran agama, pertemuan organisasi dan tempat berdialog para tokoh Islam dan non Islam.

Selain itu pada tahun 1913 mendirikan organisasi sosial Tsamaratul Ikhwan untuk menerbitkan kitab-kitab kecil dan brosur tentang pelajaran agama Haji Abdul Karim Amarullah atau lebih dikenal dengan nama Haji Rosul adalah ayah kandung Prof. Hamka, Ulama terkenal, adalah sangat kritis, keras dan tanpa kompromi terhadap hal-hal yang bersifat prinsip. Dari Haji Rosul, lembaga Muhammadiyah mulai terkenal di Minangkabau.

Haji Abdullah Ahmad juga ikut terlibat dalam mengadakan tablig dan pertemuan-pertemuan tentang masalah agama serta mendirikan

perkumpulan Jamaah Adabiah di Padang. Sheikh Ibrahim Musa juga ikut mendirikan Surau Thawalib dan Zainuddin Labai Al-Junusi tidak ketinggalan menjadi guru dan penulis aktif untuk menyebarkan pengetahuan-pengetahuan tentang agama bagi masyarakat.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa para Ulama secara individual ikut terjun dalam mencerdaskan masyarakat, baik melalui dakwah dengan ilmu agama yang dimilikinya, juga melalui tulisan-tulisannya dalam majalah-majalah maupun brosur-brosur. Dalam hal mereka menganggap bahwa yang terpenting masyarakat dibuka wawasan berpikirnya. Dengan mengubah pola pemikirannya, maka akan berubah pula pola strategi yang selama ini dilakukan masyarakat dalam menghadapi Kolonial Belanda.

Selain gerakan individu, gerakan yang dilakukan oleh lembaga juga ikut membantu gerakan pendidikan di Minangkabau, yaitu antara lain dengan munculnya Sekolah Adabiyah dan Surau Jembatan Besi.<sup>6</sup> Sekolah Adabiyah ini yang pertama berasal dan diasuh oleh masyarakat Islam untuk merombak system pendidikan tradisional di Minangkabau. Sedangkan Jembatan Besi yang mengawali berdirinya Sekolah Thawalib pada tahun 1918. Thawalib ini akhirnya berubah menjadi partai politik pada tahun 1932 dengan nama Permi.

Muhammadiyah dan Persis adalah dua lembaga yang juga mempunyai andil dalam gerakan pendidikan di Indonesia. Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan pembaharu di Indonesia dan sampai saat ini gaungnya masih terdengar. Selain mengelola lembaga pendidikan dari TK sampai Perguruan Tinggi, Muhammadiyah juga mengelola lembaga Kesehatan seperti Rumah Sakit, Panti Asuhan dan Panti Jompo. Muhammadiyah didirikan oleh seorang ulama di Yogyakarta yang bernama KH. Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912.<sup>7</sup>

Persis didirikan oleh keluarga dari Palembang pada tahun 1920. Tokoh Persis yang sangat terkenal adalah Ahmad Hassan dan Muhammad Natsir yang pernah menjabat Perdana Menteri Pertama pada masa Demokrasi Parlemerter. Saat itu Persis bergerak di bidang pendidikan, tablig, publikasi dan kursus-kursus dan sampai saat ini, persisi masih eksis dengan Pondok Pesantrennya, baik di Bandung, maupun Bangil Jawa Timur yang diteruskan oleh keturunan Ahmad Hassan.

Al-Irsyad dan Jamiat Khair muncul dari kalangan masyarakat Arab yang ikut berperan mendirikan lembaga pendidikan di Indonesia dalam rangka mencerdaskan bangsa (umat Islam). Sheikh Ahmad Soorkati

adalah tokoh yang sangat terkenal dari Al-Irsyad. Sampai kini Al-Irsyad masih *survive* dengan mengelola lembaga pendidikan dan kesehatan, mengikuti jejak Muhammadiyah.

Kemunculan lembaga-lembaga pendidikan yang menandai adanya gerakan sosial pendidikan di Indonesia pada masa Kolonial Belanda, tidak terlepas dari peran para Ulama atau Kiai yang memang ikut memikirkan nasib masyarakat Indonesia pada waktu itu dalam menghadapi pemerintah Kolonial Belanda. Dengan kekuatan senjata yang canggih, tentu saja tidak dimiliki bangsa Indonesia pada waktu itu, sehingga gerakan pendidikan yang dipelopori oleh para Ulama atau Kiai diharapkan dapat membantu perubahan pola pikir masyarakat yang pada masa itu masih belum maju.

### **b) Gerakan Politik**

Dalam gerakan politik, terdapat tiga partai yang dapat memberikan gambaran munculnya gerakan politik pertama di Indonesia, yaitu Sarekat Islam (SI), Partai Muslimin Indonesia (PMI) dan Partai Islam Indonesia (PII). Dari ketiga partai tersebut, Sarekat Islamlah yang lebih awal muncul, sehingga menurut Deliar Noer, asal usul pertumbuhan gerakan politik di kalangan Muslim di Indonesia dapat diidentikkan dengan asal-usul dan pertumbuhan Sarekat Islam.<sup>8</sup>

Sarekat Islam didirikan pada tanggal 11 November 1912 yang didahului oleh pendirian SDI (Sarekat Dagang Islam) pada tanggal 16 Oktober 1905 oleh Samanhudi dan akhirnya banyak tokoh Islam ikut di dalamnya, seperti KH HOS Tjokroaminoto. Semula SDI ikut melindungi para pedagang batik Muslim di Solo dari para pedagang Cina namun akhirnya haluan ke arah politik. Pada periode tahun 1916-1921 barulah Sarekat Islam menonjolkan visinya dalam bidang politik.

Hal ini ditampakkan pada kongres-kongres tahunannya yang semula tidak menggunakan kata “Nasional”, akhirnya dipakai. Dalam asasnya SI juga mengharapakan kehancuran kekuasaan “kapitalisme” dan dalam program kerjanya, SI menghendaki berdirinya Dewan-dewan daerah, perluasan hak-hak Volksraad, penghapusan kerja paksa dan izin bepergian.

Di bidang pendidikan menuntut penghapusan diskriminasi, di bidang agama menuntut penghapusan UU yang menghambat penyebaran agama Islam, bidang keadilan menuntut pemisahan kekuasaan Yudikatif dan Eksekutif, serta perlindungan bagi orang miskin. Dalam bidang agraria,

mohon penghapusan hak pemilikan tanah (tuan tanah) dan bidang keuangan, mengharapakan penetapan pajak yang proporsional.

Apabila dilihat peran Sarekat Islam, maka tidak terlepas dari peran individu di dalamnya yang *notabene* adalah orang-orang yang pandai dalam ilmu agama, maupun ilmu umum lainnya atau dengan kata lain orang yang memiliki kriteria sebagai Ulama yang dikatakan oleh Abdul Basit Adnan.

Partai Muslimin Indonesia (PMI) dan Partai Islam Indonesia (PII) dipimpin pula oleh orang-orang yang memahami agama Islam dengan baik, sehingga ingin mengimplementasikan ke dalam kehidupan bernegara. Mungkin saat ini agama hanya dipakai sebagai alat politik, sehingga simbol Islam dalam partai masih perlu diragukan, tetapi dapat dikatakan bahwa pada zaman dulu, integritas orang-orang partai tidak perlu diragukan artinya ada keinginan kuat untuk menerapkan syariat Islam dengan baik.

Permi mengadakan gerakan swadesi seperti Mahatma Gandhi di India. Cita-citanya adalah Islam mulia dan Indonesia sentosa via Indonesia merdeka. Partai ini berpendapat bahwa kemerdekaan harus diraih, karena merupakan langkah untuk mencapai kemakmuran.

Partai Islam Indonesia dibentuk tanggal 4 Desember 1938 menuntut Indonesia Berparlemen dan menghendaki negara kesatuan dengan pemerintah yang demokratis, dan pemilu yang luber. Selain itu menginginkan perluasan hak-hak politik, kemerdekaan berbicara, mengeluarkan pendapat dan berpikir serta kebebasan pers. Ke semuanya ini wajar merupakan tuntutan partai pada waktu itu, karena bangsa Indonesia masih terbelenggu oleh penjajah Belanda, sehingga kebebasan tidak dirasakan.

Selain gerakan partai politik yang dapat dilihat sebagai gerakan kelompok masyarakat yang dipimpin para Ulama atau Kiai, maka peran Ulama dapat dilihat di daerah Aceh pada saat melawan Belanda. Aceh adalah bagian wilayah Indonesia yang paling terakhir ditaklukkan oleh pihak Belanda. Hal ini dikarenakan Ulama di sana tidak hanya sebagai pemimpin agama, tetapi juga sebagai panglima perang. Perlawanan yang sengit ditunjukkan rakyat Aceh di bawah pimpinan Ulama Chick Kutaharang pada saat perang pada tanggal 5 April 1873<sup>9</sup> yang berhasil memukul mundur Kolonial Belanda, sehingga Major General Khler mati tertembak.



Semua ini membuktikan bahwa Ulama sangat berperan dalam perjuangan kemerdekaan di Indonesia.

### Masa Penjajahan Jepang

Peranan dan pengaruh Ulama yang kuat juga terdapat pada masa penjajahan Jepang. Bangsa Jepang berusaha merangkul Ulama dan umat Islam, bahkan hendak dijadikan sebagai alat penetrasi ke alam kehidupan rohani bangsa Indonesia.<sup>10</sup>

Pada bulan Maret 1942, kekuasaan Kolonial Belanda terusir dari Indonesia oleh pasukan tentara Jepang.<sup>11</sup> Masyarakat Indonesia pada waktu itu tidak menyenangi lagi kepada Belanda, sehingga kehadiran Jepang disambut baik oleh rakyat Indonesia dengan harapan akan mendapat perlakuan yang lebih baik daripada Belanda. Kehadiran Jepang akhirnya disambut baik. Hal ini ditunjukkan oleh masyarakat Aceh dengan bantuan umat Islam Indonesia, “kedatangan Jepang dijemput rakyat yang diorganisasikan oleh Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) dengan melakukan sabotase dan membunuh orang-orang Belanda untuk meratakan jalan bagi pendaratan Jepang”.<sup>12</sup> Di sini terlihat bahwa Ulama ikut berperan dalam menyongsong kehadiran pihak penjajah Jepang dengan harapan akan mengadakan perubahan yang lebih baik.

Kedatangan Jepang memang telah ditunggu-tunggu oleh rakyat Indonesia untuk mengusir Belanda dari tanah air. Apalagi Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi rakyat Indonesia dan mengatakan bahwa dirinya adalah pemimpin dan pelindung Asia.

Pada masa Kolonial Belanda, rakyat Indonesia dipecah menjadi dua. Bagi yang dapat diajak kerja-sama akan mendapat perlakuan yang lebih baik. Umat Islam pada waktu itu tidak mendapat perlakuan adil dari pihak Kolonial Belanda. Para Priayilah yang dijadikan *corner stone* oleh pihak pemerintah Kolonial Belanda dalam menghadapi rakyat Indonesia, tetapi pada masa Jepang, hal ini berubah. Jepang bergandeng tangan dengan umat Islam, dengan merangkul para Ulama.

Kedekatan pihak Jepang dengan para Ulama, karena sebelum menginjakkan kakinya ke Indonesia, Jepang telah mempelajari terlebih dahulu sistem sosial rakyat Indonesia dan menganggap bahwa ternyata Ulama memiliki peran yang kuat di tengah masyarakat atau menduduki posisi sebagai “*spritual helper politic and social*”.<sup>13</sup>

Kedekatan Ulama dan umat Islam dengan pihak Jepang sangat menguntungkan umat Islam sendiri. Ada tiga keuntungan yang diterima umat Islam; *pertama*, para Ulama ditempatkan di kantor *Shumuka* dan *Shumuba* (Departemen Agama) seperti Hoesein Djajadiningrat dan KH. Hasyim Asy'ari. *Kedua*, pihak Jepang membuka kesempatan kepada umat Islam untuk membentuk laskar Hizbullah pada tahun 1944<sup>14</sup> dan Sabilillah (pasukan militer bagi Ulama) serta GYU GUN (semacam PETA di Jawa).<sup>15</sup> *Ketiga*, pembentukan Masyumi (Majelis Suro Muslimin Indonesia) dengan membubarkan MIAI.

Kebijaksanaan-kebijaksanaan Jepang yang diberikan kepada umat Islam sebenarnya dalam rangka menghadapi sekutu (Amerika), tetapi ternyata justru menguntungkan umat Islam dan rakyat Indonesia pada umumnya dalam merebut kemerdekaan dari pihak Jepang.

Dari uraian di atas terlihat bahwa peran Ulama pada masa Jepang sangat kuat, meskipun tidak merupakan konfrontasi seperti yang terlihat pada masa Kolonial Belanda, karena pada masa ini adalah masa bulan madu antara Ulama atau umat Islam dengan Jepang.

## **Masa Kemerdekaan**

### **1. Awal Kemerdekaan**

Dalam rangka persiapan kemerdekaan, Jepang membentuk suatu badan persiapan dengan nama BPUPKI yang beranggotakan 60 orang. Dalam sidangnya yang pertama, badan ini bertugas merumuskan Dasar Negara dan Bentuk Negara.

Setelah sidang pertama, dari keenam puluh orang tersebut, 38 orang anggota melanjutkan pertemuan dengan membentuk 'panitia kecil' yang terdiri dari sembilan orang antara lain Soekarno, Muhammad Hatta, AA. Maramis, Abikusno Tjokrosoejoso, Abdul Kahar Muzakkir, Haji Agus Salim, Achmad Soebardjo, KH. Abdul Wahid Hasyim dan Muhammad Yamin. Empat di antaranya berasal dari Nasionalis Sekuler dan empat lainnya berasal dari Islam Nasionalis, sedangkan satu berasal dari kalangan non muslim.

Dari komposisi panitia tersebut terlihat bahwa Ulama atau Kiai masih berperan dalam penegakkan Dasar Negara, sehingga mereka dapat dikatakan sebagai *The Founding Fathers*. Meskipun perumusan yang dikenal dengan nama Piagam Jakarta ini tidak memuaskan pihak Islam, karena ada perbedaan pendapat di penghujung pembacaan teks

proklamasi, tetapi umat Islam merasa bahwa hal itu merupakan sebuah pengorbanan besar, karena “jiwa” toleransi yang dimiliki umat Islam.<sup>16</sup>

Peran dan perjuangan para Ulama dan Kiai perlu diteladani dengan jiwa yang besar demi kesatuan dan persatuan bangsa mereka rela berkorban.

## 2. Demokrasi Parleментар

Kecendekiawanan dan keahlian dalam politik diteruskan oleh generasi muda dengan membentuk partai-partai politik seperti Masyumi, Perti, PSII dan NU. Di sini berhimpunnya Ulama dan Kiai-kiai muda. Mereka mencoba untuk berperan dalam pemerintahan dan hal ini dibuktikan dengan beberapa kali posisi kabinet dipimpin oleh Masyumi seperti Muhammad Natsir, Sukiman Boerhanuddin dan Roem dalam kabinet Ali Sastroamidjojo II bersama dengan KH Idham Khalid.

Pada masa ini suasana pemerintahan sangat demokratis, meskipun umur kabinet tidak berselang lama-sering berganti-ganti, tetapi integritas dari para tokoh politik sangat bagus dan rasa tanggung jawab cukup besar, sehingga ketika terjadi mosi tidak percaya, maka dengan segera mereka menyerahkan kembali mandatnya kepada Presiden.

## **Perubahan Peran Ulama**

### 1. Demokrasi Terpimpin

Perubahan peran Ulama mulai terlihat pada masa Demokrasi Terpimpin dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Pada masa ini, Partai Politik sebagai aspirasi umat Islam tinggal NU, Perti dan PSII yang dirangkul oleh Soekarno ke dalam pemerintahan.

Meskipun NU masih dapat dikategorikan wadah aspirasi umat Islam dan partai para Ulama, tetapi dapat dikatakan peran yang dimainkan tidak sekuat Masyumi pada masa Demokrasi Parleментар, karena NU di sini kekuasaannya hanya terbatas pada Departemen Agama. Sedangkan Masyumi pernah beberapa kali memegang jabatan Perdana Menteri.

Dengan demikian, dapat dikatakan peran Ulama atau Kiai mulai surut pada masa Demokrasi Parleментар. Apalagi pemerintahan Soekarno didampingi oleh kekuatan lain seperti PKI dan Militer. Militer mulai tampak perannya dalam politik dengan dimasukkannya oleh Soekarno dalam lembaga yang namanya Dewan Nasional—pada tanggal 6 Mei 1957<sup>17</sup>—sebuah lembaga yang ikut membantu pemerintah. Selain itu,

konsep “jalan tengah”<sup>18</sup> yang dikemukakan Nasution, juga ikut andil dalam melanggengkan jalan bagi Militer dalam politik. Dari kedua peristiwa ini yang mengantar militer mulai menginjakkan kakinya sebagai kekuatan sosial politik di Indonesia.

## 2. Pemerintahan Orde Baru

### a) Keterlibatan Militer dalam politik

Pemerintahan Orde Baru ditandai dengan memprioritaskan pembangunan ekonomi dan kekuasaan Militer yang kuat. Keterlibatan Militer dalam politik pada masa Orde Baru diperkuat dengan hadirnya konsep Dwi Fungsi ABRI. Artinya bahwa Militer tidak hanya sekedar sebagai penjaga keamanan, tetapi juga sebagai kekuatan sosial politik. Selain itu, militer dianggap sebagai stabilisator untuk menjaga pembangunan yang dicanangkan pemerintah, sehingga semua kekuatan sosial politik harus dikooptasi agar tidak mengganggu jalannya pembangunan. Apabila tidak, maka dikhawatirkan investor akan lari, tidak mau menanamkan modalnya di Indonesia.

### b) Semua kekuatan sosial politik terkooptasi

Segala aktivitas yang dilakukan masyarakat harus terkendali, tidak terkecuali di bidang politik. Partai-partai difusikan menjadi tiga, sehingga ada keterbatasan masyarakat dalam menyuarakan aspirasinya. Apalagi ditambah terkooptasinya kedua partai yang ada. Masyarakat dipolitisasi sedemikian rupa, sehingga terjadi *kuningisasi* (semua harus memilih Golkar), karena Golkar adalah partai pemerintah –bentukan Militer. Selama Orde Baru berkuasa, selalu yang menjadi pemenang adalah Golkar. Masyarakat “diwajibkan” memilih Golkar. Tidak sedikit para Ulama atau Kiai yang memiliki Pondok-pondok Pesantren “dipaksa” untuk mencoblos Golkar dan dengan terpaksa mereka menuruti perintah. Banyak Ulama atau Kiai yang semula bernaung di bawah partai Islam, berbondong-bondong pindah ke Golkar. Apakah hal ini dapat dikatakan bahwa sebuah strategi Ulama atau Kiai agar *survive* atau demi dirinya sendiri. Tetapi yang pasti bahwa di bawah pemerintahan Orde baru semua terkooptasi.

Semua organisasi yang terbentuk atau akan mengadakan kegiatan harus mendapat izin terlebih dahulu dari pemerintah. Para Ulama atau penceramah, naskahnya diperiksa terlebih dahulu oleh pemerintah. Yang

terlalu vokal akan diinterogasi atau masuk penjara dengan tuduhan subversif.

Dengan terkooptasinya semua kekuatan sosial politik yang ada, maka tidak tampak di sini peranan yang menonjol yang dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin informal tidak terkecuali para Ulama atau Kiai. Apalagi peran politik umat Islam sengaja dimarginalkan oleh pemerintah Orde Baru.

### **Kesimpulan**

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peranan Ulama mulai mengalami perubahan pada masa Demokrasi terpimpin dan Orde Baru. Yang sangat jelas sekali yaitu pada masa Orde Baru, karena Ulama atau Kiai tidak lagi memiliki peran yang berarti, hanya sebagai alat peneguh kepemimpinan Orde Baru. Semua ini diakibatkan oleh kepemimpinan yang dipegang Militer secara otoriter, sehingga semua kekuatan sosial politik sengaja dikooptasi peran Ulama tidak lagi tampak seperti pada masa-masa sebelumnya.

Meskipun demikian, pada masa Era Reformasi, mulai tampak peran Ulama atau Kiai ke permukaan dengan munculnya pemimpin-pemimpin agama yang melibatkan diri dari kancah perpolitikan praktis seperti pada kasus perang di Ambon di bawah pimpinan komando jihad, dll. Di sini umat Islam berperang melawan kezaliman yang dilakukan oleh saudara sebangsa sendiri. Selain itu kalau ditelusuri, kasus GAM di Aceh juga tidak terkecuali melibatkan Ulama-ulama/pemimpin masyarakat, sehingga banyak juga yang terbunuh akibat perang antar saudara ini.

Namun dengan adanya penangkapan pemimpin-pemimpin agama pada saat ini, maka hal ini sebagai tanda-tanda akan kembali ke masa Orde Baru.

## Catatan Kaki

1. Umar Hasyim, *Mencari Ulama Pewaris Nabi* (Surabaya: Bina Ilmu, 1983), 14.
2. Abdul Basit Adnan, *Kemelut di NU: antara Kiai dan Politisi* (Solo: Mayasari, 1982), 4.
3. Monografi Jawa Timur, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977, 49.
4. Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942* (Jakarta: LP3ES, 1980), 37.
5. Abdul Azis Thaba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru* (Jakarta: Gema Insani Pres, 1996), 128.
6. Deliar Noer, *Op. Cit.*, 55.
7. *Ibid.*, 84.
8. *Ibid.*, 114.
9. Prisma 4, Jakarta: LP3ES, 1984, 22.
10. Nourouzzaman Shiddiqi, *Menguak Sejarah Muslim Suatu Kritik Metodologi* (Yogyakarta: PLP2M, 1984), 102.
11. A. Syafii Maarif, *Islam dan Politik di Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin 1959-1965* (Yogyakarta: IAIN Kalijaga Press, 1988), 20.
12. Nourouzzaman Shiddiqi, *Op. Cit.*, 101.
13. *Ibid.*, 99.
14. A. Syafii Maarif, *Op. Cit.*, 21.
15. Taufik Abdullah, *Agama dan Perubahan Sosial* (Jakarta: CV. Rajawali, 1983), 72.
16. Endang Saifudin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945* (Bandung: Pustaka, 1983), 41.
17. Leo Suryadinata, *Golkar dan Militer Studi tentang Budaya Politik* (Jakarta: LP3ES, 1992), 10.
18. *Ibid.*, 41.

## Daftar Pustaka

- Abdullah, Taufik. *Agama dan Perubahan Sosial*, Jakarta: CV. Rajawali, 1983.
- Adnan, Abdul Basit. *Kemelut di NU: antara Kiai dan Politisi*, Solo: Mayasari, 1982.
- Anshari, Endang Saifudin. *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*, Bandung: Pustaka, 1983.
- Hasyim, Umar. *Mencari Ulama Pewaris Nabi*, Surabaya: Bina Ilmu, 1983.
- Maarif, A. Syafii. *Islam dan Politik di Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin 1959-1965*, Yogyakarta: IAIN Kalijaga Press, 1988.
- Monografi Jawa Timur, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977.
- Noer, Deliar. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta: LP3ES, 1980.
- Prisma 4, Jakarta: LP3ES, 1984.
- Shiddiqi, Nourouzzaman. *Menguak Sejarah Muslim Suatu Kritik Metodologi*, Yogyakarta: PLP2M, 1984.

- Suryadinata, Leo. *Golkar dan Militer Studi tentang Budaya Politik*, Jakarta: LP3ES, 1992.
- Thaba, Abdul Azis. *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

